

Model Kepemimpinan Berkeadilan Umar bin Khattab sebagai solusi terhadap krisis integritas pemimpin masa kini

*Ratu Mustarsyiddah¹, Achmad Maftuh Sujana², Syifaul Kolbi³,
Muhammad Fardan Rabbani⁴

^{1,2,3,4}Prodi Bimbingan Konseling Islam

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Co-Author: *Ratu Mustarsyiddah

E-mail: * 231340082.ratu@uinbanten.ac.id¹, maftuhsujana@gmail.com²,
231340087.syifaul@uinbanten.ac.id³, 231340085.m.fardan@uinbanten.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang model kepemimpinan berkeadilan Umar bin Khattab sebagai solusi konseptual dan moral terhadap krisis integritas pemimpin masa kini. Krisis integritas yang melanda berbagai sektor pemerintahan modern ditandai oleh praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan hilangnya orientasi moral pemimpin. Melalui pendekatan studi literatur (*library research*) dengan analisis deskriptif-kualitatif, penelitian ini menelaah nilai-nilai dasar kepemimpinan Umar bin Khattab seperti keadilan (*'adl*), amanah, zuhud, dan tanggung jawab sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesederhanaan dan ketegasan Umar dalam menegakkan keadilan menjadi fondasi kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai tersebut relevan untuk diterapkan dalam konteks kepemimpinan modern guna membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, teladan Umar bin Khattab dapat menjadi paradigma kepemimpinan yang mengintegrasikan kekuatan moral, spiritual, dan etika sosial dalam menghadapi tantangan zaman.

Kata Kunci: kepemimpinan berkeadilan, Umar bin Khattab, krisis integritas

ABSTRACT

This study examines the justice-based leadership model of 'Umar ibn al-Khattāb as a conceptual and moral solution to the contemporary crisis of leadership integrity. The integrity crisis affecting various sectors of modern governance is marked by corruption, abuse of authority, and the erosion of leaders' moral orientation. Through a library research approach combined with descriptive-qualitative analysis, this research explores the fundamental leadership values of 'Umar ibn al-Khattāb, including justice (*'adl*), trustworthiness (*amānah*), asceticism (*zuhd*), and social responsibility. The findings indicate that 'Umar's simplicity and firmness in upholding justice formed the foundation of leadership that is both integrity-driven and oriented toward public welfare. These values remain highly relevant for contemporary leadership in establishing clean, transparent, and accountable governance. Thus, the exemplary leadership of 'Umar ibn al-Khattāb may serve as a

paradigm integrating moral strength, spiritual depth, and social ethics in addressing modern challenges.

Keywords: Justice-Based Leadership, 'Umar ibn al-Khattāb, Integrity Crisis



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan unsur fundamental dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu bangsa. Dalam realitas sosial masa kini, krisis kepemimpinan menjadi fenomena yang terus berulang di berbagai level pemerintahan, organisasi, bahkan institusi keagamaan. Krisis ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan spiritual yang paling mencolok adalah krisis integritas. Fenomena korupsi, penyalahgunaan jabatan, politik uang, gaya hidup hedonis, serta lemahnya tanggung jawab sosial mencerminkan hilangnya nilai amanah dan akhlak dalam kepemimpinan modern. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan model kepemimpinan alternatif yang tidak hanya menekankan efisiensi dan kekuasaan, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai etika, moral, dan spiritual (Lubis, 2016).

Integritas merupakan pondasi utama dari kepemimpinan yang bermartabat. Namun di era modern, banyak pemimpin kehilangan orientasi moral akibat dominasi kepentingan ekonomi dan politik praktis. Menurut berbagai penelitian etika publik, penyebab utama krisis integritas adalah hilangnya kesadaran amanah dan lemahnya nilai spiritual dalam pengelolaan kekuasaan. Pemimpin yang seharusnya menjadi teladan justru menjadi sumber penyimpangan. Akibatnya, muncul degradasi kepercayaan publik (public distrust) terhadap institusi negara dan figur pemimpin. Krisis ini bukan hanya persoalan hukum, melainkan krisis moral yang membutuhkan pendekatan nilai dan keteladanan historis bukan sekadar reformasi sistem (Munawaroh & Kosim, 2017).

Dalam sejarah peradaban Islam, sosok Umar bin Khattab r.a. merupakan representasi paling nyata dari model kepemimpinan berkeadilan dan berintegritas. Sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Shiddiq, Umar berhasil membangun pemerintahan yang kuat, efisien, namun tetap sederhana dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Keberhasilannya bukan semata karena kemampuan politik, melainkan karena keteguhan moral dan kedalaman spiritualnya. Umar hidup dalam kesederhanaan, menolak kemewahan, dan selalu mengawasi diri agar tidak tergelincir oleh kekuasaan. Prinsip keadilan (*'adl*), amanah, dan tanggung jawab menjadi pilar utama kebijakannya. Nilai-nilai inilah yang menjadikan model kepemimpinan Umar relevan untuk direkontekstualisasikan dalam menjawab krisis integritas pemimpin masa kini (Setiyowati, 2016).

Kepemimpinan Umar bin Khattab tidak hanya berakar pada tradisi Islam, tetapi juga mencerminkan nilai universal yang dibutuhkan oleh semua sistem pemerintahan modern: keadilan, transparansi, empati, dan akuntabilitas. Ia menolak dikultuskan, membuka diri terhadap kritik rakyat, dan menjadikan hukum sebagai alat keadilan sosial, bukan alat kekuasaan. Sistem pengawasan dan akuntabilitas yang diterapkannya seperti pemeriksaan harta pejabat, pelaporan terbuka, dan pengawasan langsung terhadap kondisi rakyat menunjukkan kecanggihan moral yang bahkan melampaui praktik pemerintahan modern (Adib, 2017). Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa model kepemimpinan berkeadilan ala Umar mampu menjadi jembatan antara etika spiritual dan tata kelola pemerintahan kontemporer.

Konteks kepemimpinan modern menuntut pemimpin yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas spiritual dan moral. Dalam situasi di mana banyak pejabat publik kehilangan kepekaan terhadap penderitaan rakyat, nilai kesederhanaan dan empati Umar bin Khattab menjadi solusi konkret. Model kepemimpinan beliau menawarkan paradigma servant leadership (kepemimpinan pelayan) yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa. Ia juga menegaskan pentingnya musyawarah (syura) sebagai prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan, serta akuntabilitas publik sebagai mekanisme pengawasan kekuasaan. Relevansi ini membuktikan bahwa keteladanan Umar bukan hanya bernilai historis, tetapi juga fungsional bagi pembentukan sistem pemerintahan modern yang bersih, transparan, dan berkeadilan (Rianawati, 2015).

Kajian tentang Model Kepemimpinan Berkeadilan Umar bin Khattab sebagai Solusi terhadap Krisis Integritas Pemimpin Masa Kini bertujuan untuk menggali kembali prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang telah terbukti efektif dalam sejarah, serta menganalisis relevansinya dalam konteks sosial-politik abad ke-21. Kajian ini berupaya menunjukkan bahwa solusi terhadap krisis integritas tidak semata melalui reformasi struktural, tetapi melalui revolusi moral dan spiritual yang meneladani karakter Umar bin Khattab. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam membangun etika kepemimpinan yang berbasis nilai keadilan, amanah, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial, yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Wati, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode ini dipilih karena topik kepemimpinan Umar bin Khattab lebih tepat dikaji melalui penelusuran teks-teks historis, sumber klasik, dan literatur ilmiah kontemporer. Pendekatan kualitatif-deskriptif bertujuan untuk

memahami secara mendalam nilai-nilai, prinsip, dan karakteristik model kepemimpinan berkeadilan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menafsirkan data dalam konteks moral, sosial, dan spiritual sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan dengan krisis integritas pemimpin masa kini.

Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Sumber tersebut meliputi kitab sejarah klasik Islam seperti *Tarikh al-Tabari*, *al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah*, karya ulama seperti al-Ghazali dan Ibn Qudamah, serta hasil penelitian kontemporer dari jurnal-jurnal akademik, buku-buku ilmiah, dan artikel yang membahas kepemimpinan Islam, nilai-nilai zuhud, dan konsep keadilan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran pustaka (*library searching*) dengan menggunakan basis data ilmiah, katalog digital, dan sumber daring terpercaya. Setiap literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, validitas, dan kesesuaian dengan fokus kajian, yakni kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai solusi terhadap krisis integritas pemimpin modern.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan historis-kritis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi tema-tema utama dalam literatur, seperti nilai keadilan, zuhud, amanah, dan akuntabilitas kepemimpinan Umar bin Khattab. Sedangkan pendekatan historis-kritis digunakan untuk memahami konteks sosial-politik masa Umar serta relevansinya terhadap kondisi kepemimpinan saat ini. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data (*penyaringan informasi penting*), penyajian data (*pengorganisasian ide-ide utama*), dan penarikan kesimpulan (*interpretasi terhadap temuan literatur*). Melalui analisis ini, diharapkan diperoleh gambaran utuh tentang bagaimana prinsip kepemimpinan Umar dapat dijadikan model bagi pembentukan kepemimpinan berintegritas di era modern.

Untuk menjaga validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan cara membandingkan pandangan dari berbagai literatur klasik dan modern. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa interpretasi terhadap nilai-nilai kepemimpinan Umar tidak bersifat subjektif, melainkan didukung oleh bukti tekstual dan akademik yang kuat. Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek utama: (1) nilai moral-spiritual kepemimpinan Umar, (2) penerapan keadilan dan akuntabilitas publik, (3) kesederhanaan dan empati sosial, serta (4) relevansi model tersebut terhadap krisis integritas pemimpin masa kini. Dengan metode studi literatur yang sistematis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model kepemimpinan Islam berkeadilan yang aplikatif di tengah tantangan etika politik modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepemimpinan sebagai Amanah Ilahi

Model kepemimpinan Umar bin Khattab berpijak pada kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah SWT, bukan hak istimewa pribadi. Ia memahami posisinya sebagai khalifah, yakni wakil Allah di bumi yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip ini menuntut pemimpin untuk bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan. Umar sering berkata, "Seandainya seekor keledai tersandung di jalan Baghdad, aku khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku." Pernyataan ini menggambarkan tanggung jawab moral yang luar biasa. Dalam praktiknya, Umar menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap kebijakan negara dijalankan dengan niat tulus untuk kemaslahatan umat, bukan kepentingan pribadi atau golongan (Adib, 2017).

Umar bin Khattab dikenal dengan gelar Al-Faruq "pembeda antara yang benar dan yang salah" karena ketegasannya dalam menegakkan keadilan. Dalam sistem pemerintahannya, ia menetapkan standar bahwa semua warga negara setara di hadapan hukum, termasuk dirinya sendiri. Suatu ketika, Umar dipanggil ke pengadilan oleh seorang rakyat karena persoalan tanah; beliau datang tanpa pengawalan dan menerima keputusan hakim tanpa protes. Tindakan ini membangun legitimasi moral yang tinggi dan menghapus jarak antara penguasa dan rakyat. Keadilan yang ditegakkan Umar juga bersifat struktural: ia memperkuat sistem peradilan independen, menghapus praktik korupsi, dan menindak pejabat yang memperkaya diri. Prinsip keadilan ini membuat rakyat menaruh kepercayaan penuh terhadap pemerintahannya dan menjadikannya simbol pemerintahan yang bersih dan transparan (Setiyowati, 2016).

Umar bin Khattab menjalankan gaya hidup zuhud dan sederhana sebagai manifestasi integritas moral. Ia menolak hidup mewah meski memiliki kekuasaan besar. Dalam kesehariannya, Umar hanya mengenakan pakaian tambalan, makan roti kering dan minyak zaitun, serta tinggal di rumah sederhana tanpa penjagaan istana. Kesederhanaan ini bukan bentuk kemiskinan, melainkan strategi moral untuk menjaga hati agar tidak terikat duniawi. Ia berprinsip bahwa pemimpin harus merasakan penderitaan rakyatnya. Ketika masa paceklik melanda, Umar bersumpah tidak akan makan lebih baik dari rakyat yang kelaparan. Dengan demikian, nilai zuhud Umar membentuk budaya kepemimpinan yang berempati, rendah hati, dan bebas dari hedonisme sesuatu yang sangat kontras dengan gaya hidup sebagian besar pemimpin masa kini (Munawaroh & Kosim, 2017).

Salah satu ciri khas model kepemimpinan Umar adalah sistem pengawasan (accountability) yang sangat ketat. Ia tidak hanya

menuntut tanggung jawab dari bawahannya, tetapi juga membuka diri terhadap kritik rakyat. Umar melakukan "patroli malam" untuk memantau langsung kondisi masyarakat tanpa pengawalan, guna memastikan kebijakan negara benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Ia juga mengawasi kekayaan para pejabat: jika ada peningkatan harta yang tidak wajar, Umar memerintahkan penyitaan sebagian untuk dikembalikan ke kas negara. Sistem kontrol ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menegakkan prinsip transparansi. Dalam konteks modern, konsep ini sepadan dengan *good governance*, yaitu pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik (Lubis, 2016).

Kepemimpinan Umar juga dikenal sangat partisipatif. Ia menjadikan syura (musyawarah) sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan. Setiap kebijakan penting selalu melibatkan para sahabat dan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan. Umar juga membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan kritik di depan umum, bahkan mendorong rakyat agar berani menegur jika dirinya salah. Hal ini menunjukkan sistem kepemimpinan yang demokratis dalam makna Islam, di mana rakyat memiliki hak untuk mengontrol penguasa. Dalam sejarah, seorang wanita pernah menegur Umar di masjid terkait kebijakan mahar; beliau mengakui kesalahannya di depan umum dan mencabut kebijakan tersebut. Sikap terbuka ini menunjukkan keteladanan bahwa kebenaran lebih tinggi daripada ego kekuasaan (Rianawati, 2015).

Model kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi solusi konseptual dan moral atas krisis integritas pemimpin masa kini, yang ditandai dengan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan hilangnya empati sosial. Nilai-nilai zuhud, keadilan, dan tanggung jawab yang diterapkan Umar dapat diadaptasi dalam konteks modern untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Pemimpin modern perlu meneladani keberanian moral Umar dalam menolak privilese pribadi, keterbukaannya terhadap kritik, dan keberpihakannya pada rakyat kecil. Model ini juga mengajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan sebagai sarana pengabdian, bukan sarana penguasaan. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka krisis integritas dan kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan lahirlah pemimpin berkarakter adil, amanah, dan berjiwa pelayan umat sebagaimana Umar bin Khattab (Wati, 2015).

B. Jenis-jenis Model Kepemimpinan Umar bin Khattab

Jenis model pertama dari kepemimpinan Umar bin Khattab adalah model spiritual berbasis taqwa dan zuhud, yang menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai inti dari setiap kebijakan. Umar memandang kekuasaan bukan sebagai hak milik, tetapi amanah Allah SWT yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Kehidupan zuhud yang dijalankannya menjadi wujud dari kontrol diri terhadap godaan kekuasaan dan kemewahan dunia. Ia selalu menempatkan

hubungan dengan Allah sebagai sumber moral dan kekuatan batin dalam memimpin. Dalam konteks modern, model ini sangat relevan karena mampu menumbuhkan pemimpin yang berintegritas, jujur, dan berorientasi moral, bukan pemimpin yang hanya mengejar kekuasaan atau kepentingan politik pribadi. Pemimpin dengan basis spiritual seperti Umar akan menghindari korupsi karena kesadarannya bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan (Munawaroh & Kosim, 2017).

Jenis kedua adalah model kepemimpinan berkeadilan sosial, yang berfokus pada pemerataan hak dan kesejahteraan masyarakat tanpa diskriminasi. Umar bin Khattab menegakkan prinsip 'adl (keadilan mutlak), baik dalam kebijakan ekonomi, hukum, maupun sosial. Ia membentuk sistem distribusi keuangan negara (diwan) yang memastikan kesejahteraan rakyat, termasuk anak yatim, janda, dan kaum lemah. Umar juga memberlakukan pengawasan harta pejabat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperjuangkan kesetaraan hukum antara penguasa dan rakyat. Model ini penting sebagai solusi terhadap krisis keadilan modern, di mana banyak pemimpin berpihak pada elite ekonomi atau politik. Kepemimpinan berkeadilan sosial mengajarkan bahwa kekuasaan sejati terletak pada keberanian memperjuangkan hak rakyat kecil, bukan pada dominasi terhadap mereka (Jannah, 2016).

Jenis ketiga adalah model kepemimpinan pelayanan, di mana pemimpin berperan sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa yang dilayani. Umar bin Khattab mencontohkan hal ini dengan turun langsung ke lapangan, mengawasi rakyat, dan menyelesaikan masalah mereka tanpa perantara. Kisahnya yang terkenal adalah ketika beliau membantu seorang ibu miskin yang tidak mampu memasak untuk anak-anaknya, dengan memikul sendiri karung gandum di malam hari. Tindakan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah pengabdian dan empati, bukan kemegahan dan kekuasaan. Dalam konteks pemerintahan modern, model ini sangat relevan untuk melawan gaya kepemimpinan elitis dan birokratis. Pemimpin yang melayani akan membangun kedekatan emosional dengan rakyat, menumbuhkan kepercayaan publik, serta mengembalikan makna sejati dari jabatan sebagai sarana pelayanan publik dan tanggung jawab moral (Nuraeni, 2015).

Jenis keempat yaitu model kepemimpinan partisipatif (syura), yang menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Umar bin Khattab selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabat dan tokoh masyarakat sebelum menetapkan kebijakan penting. Ia juga memberi ruang bagi kritik terbuka, bahkan menerima koreksi dari rakyat biasa di hadapan publik. Contohnya, ketika seorang wanita menegurnya terkait batasan mahar, Umar tidak menolak tetapi justru mengakui kesalahannya di hadapan umum. Model ini membangun sistem pemerintahan yang

transparan, demokratis, dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Dalam konteks modern, model ini dapat diterapkan melalui kebijakan partisipatif, keterbukaan publik, dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga keputusan pemerintah tidak bersifat otoriter, melainkan hasil dari proses kolektif yang berkeadilan (Adib, 2017).

Jenis kelima adalah model kepemimpinan akuntabel, yaitu kepemimpinan yang terbuka terhadap pengawasan publik dan siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakan. Umar menerapkan sistem kontrol internal yang ketat, seperti pemeriksaan harta pejabat, audit keuangan baitul mal, serta laporan publik mengenai keuangan negara. Ia bahkan membuka kesempatan bagi rakyat untuk mempertanyakan kebijakannya secara langsung, menandakan transparansi yang tinggi. Selain itu, Umar mempraktikkan gaya hidup sederhana sebagai bentuk komitmen moral agar tidak mencurigakan dalam penggunaan sumber daya negara. Model ini menjadi solusi konkret bagi krisis integritas masa kini yang diwarnai korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jika diterapkan, model kepemimpinan akuntabel akan melahirkan pemerintahan yang bersih, terpercaya, dan berorientasi pada kejujuran publik (Lubis, 2016).

Jenis terakhir adalah model kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menginspirasi dan mentransformasi masyarakat menuju peradaban yang lebih tinggi. Umar bin Khattab memimpin dengan memberi teladan moral dan keberanian perubahan. Ia membangun sistem administrasi modern pertama dalam sejarah Islam seperti diwan keuangan, kalender Hijriyah, dan struktur provinsi semuanya didasari oleh nilai keadilan dan efisiensi. Umar tidak hanya membenahi sistem, tetapi juga membentuk karakter umat agar disiplin, jujur, dan peduli terhadap sesama. Dalam konteks ini, model ini relevan untuk melahirkan pemimpin yang mampu menginspirasi perubahan sosial dan membangun budaya kejujuran, bukan sekadar mempertahankan status quo. Kepemimpinan transformasional berkeadilan ini menjawab kebutuhan zaman modern yang haus akan figur pemimpin visioner, etis, dan berjiwa pelayan rakyat (Wati, 2015).

C. Krisis Integritas dalam Kepemimpinan Kontemporer

Krisis integritas yang melanda kepemimpinan masa kini merupakan problem multidimensional yang meliputi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hedonisme, manipulasi hukum, serta hilangnya empati sosial. Banyak pemimpin modern terjebak pada orientasi materialistik dan pragmatis, di mana jabatan dianggap sebagai alat untuk memperkaya diri dan kelompok, bukan sebagai amanah untuk mengabdikan. Fenomena ini menimbulkan krisis kepercayaan publik dan memperlemah sendi-sendi moral pemerintahan. Dalam situasi seperti ini, model kepemimpinan Umar bin Khattab menawarkan paradigma baru, bahwa kekuasaan sejati

lahir dari integritas spiritual dan moral, bukan dari status atau kekayaan. Umar menempatkan dirinya bukan di atas rakyat, tetapi bersama rakyat, menjadikan nilai ketakwaan, keadilan, dan kesederhanaan sebagai pondasi etika pemerintahan.

Solusi pertama terhadap krisis integritas adalah menanamkan nilai zuhud dan kesadaran amanah sebagaimana diteladankan oleh Umar bin Khattab. Zuhud di sini bukan berarti menjauhi dunia, tetapi menahan diri dari keserakahan terhadap kekuasaan dan harta. Umar hidup sederhana meski memegang otoritas besar, karena menyadari jabatan hanyalah titipan yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Pemimpin masa kini perlu meniru paradigma ini: menjadikan kekuasaan sebagai alat pelayanan, bukan sumber kenikmatan pribadi. Dengan menginternalisasi nilai zuhud, seorang pemimpin akan terhindar dari korupsi, gratifikasi, dan nepotisme, sebab ia menempatkan amanah publik di atas kepentingan diri. Kesadaran spiritual inilah yang dapat menghidupkan kembali etika kepemimpinan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab.

Solusi kedua adalah penerapan keadilan sosial dan akuntabilitas publik sebagaimana dilakukan Umar dalam pemerintahannya. Umar tidak hanya memerintahkan pejabatnya untuk adil, tetapi menjadi teladan dalam menegakkan keadilan terhadap dirinya sendiri. Ia pernah diadili bersama rakyat biasa, dan tidak menggunakan kekuasaan untuk membela diri. Keteladanan ini menunjukkan bahwa hukum harus berlaku setara tanpa diskriminasi jabatan atau kekayaan. Pemimpin masa kini dapat meniru sistem akuntabilitas Umar dengan memperkuat transparansi keuangan, audit terbuka, dan pengawasan publik terhadap pejabat negara. Pengawasan yang efektif akan menutup peluang bagi praktik korupsi struktural. Prinsip keadilan yang diterapkan Umar membangun legitimasi moral dan memulihkan kepercayaan rakyat dua hal yang kini sangat langka di banyak pemerintahan modern. (Yusuf, 2019).

Solusi ketiga yang ditawarkan model Umar adalah kepemimpinan pelayanan (*servant leadership*) yang berorientasi pada pengabdian dan empati sosial. Umar menolak gaya hidup elitis dan birokratis; ia terjun langsung memantau kondisi rakyat, bahkan membantu sendiri orang miskin tanpa pengawal. Kepemimpinan seperti ini menjadi jawaban atas gaya kepemimpinan modern yang sering terpisah dari realitas sosial dan penderitaan rakyat. Pemimpin yang mau turun ke bawah akan memahami permasalahan secara langsung dan mengambil keputusan berdasarkan fakta lapangan, bukan laporan politik. Nilai empati inilah yang membuat Umar dicintai dan dipercaya rakyatnya. Dalam konteks sekarang, pemimpin dengan semangat pelayanan akan memperkuat humanisasi birokrasi, mempercepat reformasi sosial, dan mengembalikan nilai kemanusiaan dalam politik.

Solusi keempat ialah penerapan prinsip syura (musyawarah) sebagai bentuk transparansi dan partisipasi rakyat dalam kebijakan publik. Umar bin Khattab selalu bermusyawarah sebelum membuat keputusan penting, baik dengan sahabat senior maupun masyarakat umum. Ia juga membuka ruang bagi rakyat untuk mengkritik kebijakannya tanpa takut dihukum. Praktik ini menjadi cikal bakal konsep good governance pemerintahan yang partisipatif, terbuka, dan demokratis. Dalam konteks masa kini, penerapan nilai syura dapat diaktualisasikan melalui mekanisme konsultasi publik, pelibatan masyarakat sipil, dan keterbukaan informasi pemerintahan. Dengan demikian, pemimpin tidak akan bersikap otoriter, dan rakyat memiliki akses terhadap kebijakan negara. Musyawarah bukan hanya bentuk demokrasi, tetapi juga mekanisme moral yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan.

Solusi terakhir yang menjadi puncak dari model Umar bin Khattab adalah keteladanan moral (uswah hasanah). Umar tidak hanya memberi perintah, tetapi menjadi contoh hidup bagi seluruh rakyatnya. Ia menolak menerima gaji besar, hidup sederhana, dan berani menanggung konsekuensi dari keputusan yang salah. Keteladanan ini menjadi energi moral yang membangun kepercayaan rakyat. Dalam konteks modern, keteladanan menjadi kunci reformasi integritas nasional, karena perubahan sistem tidak akan bermakna tanpa perubahan karakter pemimpin. Umar menunjukkan bahwa pemimpin berkeadilan bukanlah sosok sempurna, tetapi sosok yang berani mengoreksi diri dan bertanggung jawab. Jika nilai keteladanan ini dihidupkan kembali, maka krisis integritas yang menimpa banyak negara dapat diatasi melalui revolusi moral yang dimulai dari puncak kekuasaan.

D. Relevansi Nilai Spiritual dan Moral

Model kepemimpinan Umar bin Khattab memiliki relevansi mendasar dalam menjawab krisis integritas karena berpijak pada fondasi spiritual yang kuat. Umar memandang jabatan sebagai amanah, bukan privilese. Nilai-nilai seperti taqwa, zuhud, dan keikhlasan menjadi dasar bagi setiap kebijakannya. Dalam konteks masa kini, ketika banyak pemimpin kehilangan arah moral karena pengaruh kekuasaan, nilai spiritual ini menjadi landasan yang mampu membentuk kesadaran etis untuk menjaga kejujuran dan tanggung jawab. Pemimpin yang meneladani pola pikir Umar tidak akan menganggap kekuasaan sebagai sarana memperkaya diri, tetapi sebagai wadah pengabdian dan ibadah sosial. Spiritualitas kepemimpinan seperti ini merupakan antitesis terhadap gaya kepemimpinan materialistik dan hedonistik yang melahirkan korupsi dan penyalahgunaan jabatan.

Keadilan (*'adl*) adalah pilar utama dalam model kepemimpinan Umar yang tetap relevan hingga kini. Umar menunjukkan bahwa keadilan adalah ukuran keberhasilan pemerintahan, bukan kemegahan

atau prestise politik. Dalam era modern yang diwarnai praktik ketidakadilan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan, prinsip keadilan Umar menjadi inspirasi untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat di hadapan hukum. Relevansinya dapat diterapkan melalui penguatan sistem peradilan independen, audit publik, dan transparansi anggaran. Nilai keadilan yang universal ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang sah bukan diukur dari kekuatan politik, melainkan dari kemampuan menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu.

Kehidupan zuhud Umar bin Khattab juga sangat relevan dalam mengatasi krisis integritas masa kini, terutama terhadap budaya hedonisme dan politik pencitraan. Di tengah maraknya gaya hidup mewah para pejabat dan perilaku konsumtif elit politik, kesederhanaan Umar menjadi contoh nyata bahwa wibawa pemimpin tidak ditentukan oleh simbol kemewahan, tetapi oleh ketulusan dan keberpihakannya pada rakyat. Kesederhanaan bukan hanya aspek moral, melainkan strategi sosial untuk menciptakan kedekatan dengan rakyat dan menghindari kesenjangan sosial. Jika nilai ini diterapkan, maka pemimpin akan lebih fokus pada pelayanan publik, bukan citra dan status sosial. Relevansi ini semakin penting di era modern ketika krisis kepercayaan publik terhadap pejabat negara sering muncul karena gaya hidup yang kontras dengan kondisi rakyatnya.

Salah satu aspek paling visioner dari kepemimpinan Umar adalah sistem pengawasan dan akuntabilitas publik yang diterapkannya. Umar tidak hanya menuntut pertanggungjawaban dari bawahannya, tetapi juga membuka diri untuk diawasi rakyat. Dalam konteks modern, hal ini sangat relevan untuk memperkuat transparansi dan tata kelola pemerintahan (*good governance*). Praktik Umar seperti memeriksa kekayaan pejabat, melakukan patroli malam, dan mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung merupakan bentuk nyata sistem pengawasan yang beretika dan efisien. Jika diterapkan sekarang, nilai ini dapat diwujudkan dalam bentuk komisi pengawas independen, keterbukaan data publik, serta pelaporan digital yang transparan. (Sofian, 2021) Dengan demikian, model akuntabilitas Umar menjadi solusi struktural untuk menekan praktik korupsi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Relevansi berikutnya terletak pada konsep syura (*musyawarah*) yang menjadi ciri utama kepemimpinan Umar. Ia selalu bermusyawarah dengan para sahabat sebelum mengambil keputusan besar, bahkan menerima kritik dari rakyat secara terbuka. Konsep ini sejalan dengan prinsip demokrasi modern yang menekankan partisipasi publik dan keterbukaan informasi. Dalam konteks masa kini, musyawarah dapat diimplementasikan melalui partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, forum publik, serta sistem

konsultasi terbuka. Nilai syura tidak hanya memperkuat legitimasi pemimpin, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan rasa memiliki dalam masyarakat. Dengan meniru model partisipatif Umar, pemimpin masa kini dapat membangun hubungan horizontal dengan rakyat dan menumbuhkan kepercayaan sosial (social trust) yang kini kian rapuh.

Relevansi paling mendasar dari model Umar bin Khattab terletak pada keteladanan moral (uswah hasanah) sebagai sumber energi perubahan sosial. Umar bukan hanya pembuat kebijakan, tetapi sosok yang hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ia ajarkan. Dalam kondisi di mana banyak pemimpin modern kehilangan kredibilitas moral, keteladanan seperti Umar menjadi pondasi utama untuk memulihkan integritas kepemimpinan. Ia mengajarkan bahwa reformasi sejati tidak dimulai dari sistem, melainkan dari karakter dan kesadaran pemimpin itu sendiri. Jika pemimpin modern menghidupkan kembali etika seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, dan keadilan, maka krisis integritas akan berubah menjadi momentum kebangkitan moral bangsa. Dengan demikian, model kepemimpinan Umar bin Khattab tetap relevan lintas zaman karena berakar pada nilai-nilai universal yang tak lekang oleh perubahan: keadilan, kesederhanaan, dan tanggung jawab spiritual.

Tabel 1. Solusi dan Tantangan Kepemimpinan Berkeadilan Umar bin Khattab

No	Aspek Kepemimpinan Umar bin Khattab	Tantangan Pemimpin Masa Kini	Solusi Berdasarkan Teladan Umar bin Khattab	Implementasi Modern (2025)
1	Nilai Zuhud dan Kesadaran Amanah	Hedonisme politik, gaya hidup mewah, penyalahgunaan fasilitas negara.	Menerapkan gaya hidup sederhana, mengendalikan diri dari kemewahan, dan menempatkan jabatan sebagai amanah, bukan sumber keuntungan pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan fasilitas pejabat publik. - Deklarasi harta kekayaan secara terbuka. - Pendidikan etika dan integritas bagi pejabat publik.
2	Keadilan dan Persamaan Hukum ('Adl)	Hukum yang tidak adil, praktik tebang pilih, intervensi politik dalam penegakan hukum.	Menegakkan keadilan tanpa pandang bulu; pemimpin tunduk pada hukum sebagaimana rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi lembaga hukum independen. - Transparansi sidang kasus pejabat publik. - Pengawasan

				publik berbasis teknologi digital.
3	Kepemimpinan Pelayanan (Servant Leadership)	Pemimpin elitis dan jauh dari rakyat, rendahnya empati sosial.	Pemimpin turun langsung ke lapangan, melayani rakyat, memahami penderitaan mereka seperti Umar yang memikul gandum sendiri untuk rakyat miskin.	<ul style="list-style-type: none"> - Program "Pemimpin Turun Desa" dan inspeksi sosial tanpa protokol. - Penilaian kinerja berbasis kepuasan publik.
4	Akuntabilitas dan Pengawasan Kekuasaan	Korupsi struktural, penyalahgunaan anggaran, lemahnya sistem pengawasan.	Menegakkan sistem pengawasan internal dan eksternal seperti Umar yang memeriksa kekayaan pejabat dan mengaudit baitul mal.	<ul style="list-style-type: none"> - Audit publik tahunan yang terbuka. - Pembentukan dewan etika pejabat independen. - Digitalisasi laporan keuangan pemerintah.
5	Musyawaharah dan Transparansi (Syura)	Otoritarianisme, pengambilan keputusan sepihak, minim partisipasi rakyat.	Melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan membuka ruang kritik. Umar bahkan menerima koreksi dari rakyat di mimbar masjid.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi publik dan forum kebijakan terbuka. - E-governance untuk partisipasi warga. - Sistem aspirasi online di tiap lembaga pemerintahan.
6	Kesederhanaan dan Anti-Korupsi	Budaya konsumtif dan politik uang yang merusak moral pejabat.	Menjalankan pola hidup hemat, transparan, dan menolak segala bentuk gratifikasi atau	<ul style="list-style-type: none"> - Kode etik anti-suap di lembaga negara. - Sanksi sosial dan hukum tegas terhadap

			suap.	penyalahgunaan dana publik.
7	Empati Sosial dan Kepedulian Rakyat	Kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan kesejahteraan.	Pemimpin berperan aktif menyeimbangkan keadilan sosial, mendahulukan kebutuhan rakyat miskin.	<ul style="list-style-type: none"> - Program pemerataan ekonomi dan perlindungan sosial. - Alokasi APBN/APBD berbasis kebutuhan sosial riil.
8	Keteladanan Moral (Uswah Hasanah)	Hilangnya figur panutan; pemimpin kehilangan kredibilitas moral di mata rakyat.	Pemimpin memberi contoh hidup jujur, adil, dan berani mengakui kesalahan sebagaimana Umar.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan etika kepemimpinan berbasis nilai agama. - Pemberlakuan "Integrity Index" pejabat publik.
9	Reformasi dan Perubahan Berbasis Nilai (Transformasional)	Birokrasi lamban, sistem korup, dan resistensi terhadap perubahan.	Melakukan perubahan struktural dan moral secara bersamaan dengan menegakkan nilai keadilan dan tanggung jawab publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi birokrasi berbasis merit system. - Digitalisasi pelayanan publik. - Penegakan reward & punishment berbasis kinerja.
10	Kepemimpinan yang Tunduk pada Hukum Allah dan Moral Publik	Sekularisasi nilai kepemimpinan, hilangnya orientasi spiritual dalam kebijakan publik.	Menjadikan moralitas dan hukum Ilahi sebagai pedoman dalam menjalankan kekuasaan, bukan sekadar hukum buatan manusia.	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi pendidikan etika spiritual dalam pelatihan ASN dan pejabat publik. - Kebijakan publik berbasis nilai moral dan kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa Model kepemimpinan berkeadilan Umar bin Khattab merupakan teladan ideal yang memadukan dimensi spiritual, moral, sosial, dan politik secara harmonis. Kepemimpinannya berlandaskan pada nilai zuhud, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang menjadikan kekuasaan bukan sarana kemegahan, melainkan sarana pengabdian kepada Allah dan umat. Prinsip keadilan yang ia tegakkan mencakup keadilan hukum, ekonomi, dan sosial; kesederhanaan hidupnya mencerminkan kejujuran dan empati terhadap rakyat; sementara sistem akuntabilitas yang diterapkannya menunjukkan transparansi dan integritas yang tinggi. Nilai-nilai tersebut bukan hanya bernilai historis, tetapi juga menjadi fondasi moral universal bagi pembentukan pemerintahan modern yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Dalam konteks masa kini, di tengah maraknya krisis integritas dan degradasi moral pemimpin, model kepemimpinan Umar bin Khattab menawarkan solusi konseptual dan praktis yang relevan. Spiritualitas dan moralitas yang beliau bangun dapat menjadi pedoman dalam mereformasi perilaku pejabat publik, memperkuat sistem pengawasan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Dengan meneladani keadilan, kesederhanaan, dan keberanian moral Umar, bangsa modern dapat membangun sistem kepemimpinan yang berkarakter, berintegritas, dan berkeadilan, sehingga krisis kepercayaan publik dapat dipulihkan dan arah pemerintahan kembali berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, A. (2017). Pola pendidikan Islam periode Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Mubtadiin*, 7(2), 297–312. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin/article/view/149>
- Aiman, U. (2018). Masa peradaban Islam Khulafaur Rasyidin. *Tarbawi*, 10(2), 24–36. <https://journal.stitdarulhijrahmtp.ac.id/index.php/Jurnal/article/view/82>
- Akbar, A., Lubis, J. M., Sumitro, D., Hambali, L., & Tobing, D. (2016). Sejarah perkembangan hukum Islam periode Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4458–4467. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13068>
- El-Basyiry, A. M. (2015). *Meneladani kepemimpinan khalifah: Khulafaur Rasyidin dan khalifah pilihan*. Amzah.
- Erfinawati, E., Zuriatin, Z., & Rosdiana, R. (2017). Sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin (11–41 H/632–661 M).

- Jurnal Pendidikan IPS*, 9(1), 29–40.
<https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.172>
- Fauzi, M., & Jannah, S. A. (2015). Peradaban Islam: Kejayaan dan kemundurannya. *AL-IBRAH*, 6(2), 1–26.
<https://doi.org/10.61815/alibrah.v6i2.132>
- Huda, F. (2016). Pemikiran pendidikan Islam pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin. *Kutubkhanah*, 20(2), 137–151.
<https://repository.uin-suska.ac.id/70224/>
- Husna, F., Lubis, F., Wardani, S., & Al Fatia, S. (2018). Periodisasi dan perkembangan peradaban Islam dan ciri-cirinya. *Journal on Education*, 5(2), 2899–2907.
<https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.939>
- Iramadhania, F., Ananda, Y. A. T., Hartanti, T., & Zulham, Z. (2017). Peradaban Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(1), 67–78.
<https://doi.org/10.55606/inovasi.v3i1.2582>
- Khairul, A., Firza, N., Kabeakan, N., Sari, P. A., & Aulia, S. P. (2018). Periodisasi perkembangan peradaban Islam dan ciri-cirinya. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9654–9661.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9906>
- Lubis, J. (2016). Kontribusi peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin: Pembentukan masyarakat politik Islam. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 17(1), 75–84.
<http://dx.doi.org/10.29300/madania.v17i1.2844>
- Muflich, M. F. (2018). Pola perkembangan pendidikan Islam pada periodisasi Khulafa'ur Rasyidin dan implementasinya terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. *FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 93–106.
<https://doi.org/10.37812/fatawa.v2i1.393>
- Munawaroh, N., & Kosim, M. (2017). Pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin dan perannya dalam pengembangan pendidikan Islam. *Jurnal Kawakib*, 2(2), 78–89.
<https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i2.25>
- Rachman, U., & Widodo, A. (2016). Pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin dan kontekstualisasinya pada pendidikan Islam masa kini. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(1), 250–259.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/3355>
- Rahmani, A. F. (2018). Penerapan media leaflet berbasis ICT untuk meningkatkan minat dan hasil belajar kognitif siswa pada materi biografi Khulafaur Rasyidin. *SKULA: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah*, 2(3), 189–200.
<http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/skula/article/view/433>
- Ramadhan, H. R., Mulyawan, M., Hidayani, I., & Mahdi, I. (2017).

- Metode discovery learning dalam pembelajaran sejarah Khulafaurrasyidin. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 143–158. <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v8i01.357>
- Rianawati, A. I., Lestari, S. M., Yuningsih, E., Amelia, C., & Nuraeni, A. (2015). Penyuluhan meneladani gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin bagi mahasiswa di era 4.0. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 110–125. <https://ejournal.iainkjmalang.ac.id/index.php/Khidmat/article/view/353>
- Roselani, N., Lubis, M. R., Azhari, S., & Ruwina, Y. (2018). Peradaban Islam masa Khalifah Rasyidin. *Journal on Education*, 5(2), 2931–2938. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.943>
- Setiyowati, A., Putri, C. J., Jannah, F. M., & As'ad, M. R. (2016). Kepemimpinan Islam periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib). *Yasin*, 1(2), 262–274. <https://ejournal.yasin-alsys.org/yasin/article/view/132>
- Shamantha, C. (2018). Peradaban Islam pada masa Khilafah al-Rasyidah. *Az-Zakiy: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 34–44. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/az-zakiy/article/view/9949>
- Tabri, M., Fatia, A., & Hakim, L. (2016). Sejarah dan peradaban Islam pada zaman klasik. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 842–855. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/123>
- Yani, A. (2017). Khulafah al-Rasyidun: Menelaah kepemimpinan Abu Bakar al-Shiddiq. *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 1(1), 33–44. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/carita/article/view/3418>